

EVALUASI KEBIJAKAN JAMINAN PENDIDIKAN DAERAH (JPD) DALAM PENUNTASAN WAJIB BELAJAR 12 (DUA BELAS) TAHUN DI SD NEGERI LEMPUNYANGAN 1 YOGYAKARTA, SMP NEGERI 15 YOGYAKARTA, DAN SMA NEGERI 11 YOGYAKARTA

EVALUATION OF POLICY GUARANTEE EDUCATION AREA IN EDUCATION COMPULSORY 12 YEARS AT ELEMENTARY SCHOOLS LEMPUNYANGAN 1 YOGYAKARTA, JUNIOR HIGH SCHOOLS 15 YOGYAKARTA, AND HIGH SCHOOLS 11 YOGYAKARTA

Oleh : Ratri Puspitasari, Jurusan Filsafat dan Sosiologi Pendidikan, Prodi Kebijakan Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Yogyakarta, ratri183@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan SMA Negeri 11 Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian evaluasi yang menggunakan pendekatan kuantitatif. Model evaluasi yang digunakan ada model CIPP. Sumber data dalam penelitian ini adalah siswa, guru pengelola JPD di sekolah, staff UPT JPD, dan Kepala UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. Data dikumpulkan melalui angket, wawancara, dan studi dokumen. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan persentase.

Hasil penelitian menunjukkan tujuan kebijakan sudah tercapai yaitu untuk peningkatan kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun, serta dukungan guru dan orang tua terhadap kebijakan termasuk dalam kategori tinggi, tanggapan siswa dan guru termasuk dalam kategori tinggi, prestasi yang diraih siswa termasuk dalam kategori cukup, pelaksanaan kebijakan sudah cukup memenuhi petunjuk teknis, jumlah pengelola JPD dirasa masih kurang, sarana prasarana yang kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal, dan motivasi siswa untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi termasuk dalam kategori sangat tinggi.

Kata kunci : keefektifan, evaluasi, kebijakan jaminan pendidikan daerah (jpd)

Abstract

This research aims to reveal the Education Guarantee policy area Lempuyangan SD Negeri 1 Yogyakarta, Yogyakarta SMPN 15 and SMA 11 Yogyakarta. This study is an evaluation that uses a quantitative approach. The model of evaluation used existing CIPP models. Sources of data in this study were students, teachers, school managers in the JPD, staff UPT JPD, and Head of Unit JPD Education Office of Yogyakarta. Data were collected through questionnaires, interviews, and document. Data analysis technique used is quantitative descriptive analysis with percentages.

The results showed the policy objectives have been achieved, namely to increase educational opportunities for the people of the Region and compulsory twelve (12) years, as well as the support of teachers and parents on the policies included in the high category, student and teacher in the high category, achievement achieved by the students included in the category enough, the implementation of the policy is sufficient to meet the technical instructions, the number of managers JPD it is still lacking, lacking the infrastructure that can be utilized, and the motivation of students to proceed to a higher school included in the category of extremely high.

Keywords : effectiveness , evaluation , education assurance policy areas (JPD)

PENDAHULUAN

Kota Yogyakarta telah melaksanakan desentralisasi pendidikan yang diberlakukan dalam bentuk kebijakan. Salah satu bentuk desentralisasi pendidikan di Kota Yogyakarta yaitu menyelenggarakan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 menyebutkan bahwa Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) berupa bantuan biaya operasional dan biaya personal.

Tabel 1. Angka Putus Sekolah Di Kota Yogyakarta

| Jenjang | Thn 2012 | Thn 2013 | Thn 2014 |
|---------|----------|----------|----------|
| SD | 0,03 % | 0,03 % | 0,01 % |
| MI | 0 % | 0 % | 0 % |
| SMP | 0,04 % | 0,13 % | 0,06 % |
| MTs | 0,04 % | 0,60 % | 0,92 % |
| SMA | 0,05 % | 0,01 % | 0 % |
| MA | 0,20 % | 0,08 % | 0 % |
| SMK | 0,84 % | 0,71 % | 0,05 % |

(Sumber : Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga DIY)

Berdasarkan tabel angka putus sekolah di Kota Yogyakarta diatas, dapat dilihat bahwa angka putus sekolah di Kota Yogyakarta mengalami kenaikan dan penurunan. Tabel diatas menunjukkan bahwa masih ada anak yang putus sekolah di setiap jenjang pendidikan. Data angka putus sekolah diatas menimbulkan sebuah tanda tanya mengenai keefektifan bantuan dana pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta.

Kebijakan yang telah diimplementasikan perlu dilakukan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. Evaluasi terhadap kebijakan dapat digunakan sebagai suatu cara untuk melihat

keberhasilan sebuah kebijakan. Berdasarkan masalah angka putus sekolah di Kota Yogyakarta, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang “Evaluasi Kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah Dalam Penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Yogyakarta”.

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu : Bagaimana evaluasi kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) dalam penuntasan wajib belajar 12 (dua belas) tahun di Kota Yogyakarta ?

KAJIAN PUSTAKA

Evaluasi

Evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang kerja sesuatu dan informasi yang telah didapatkan tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan (Suharsimi Arikunto dan Cipi Safruddin, 2004:1-2). Model evaluasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu CIPP (*context, input, process, product*).

Model *context input process product* (CIPP) adalah salah satu jenis model yang akan digunakan dalam penelitian ini. Model CIPP ini dikembangkan oleh Daniel Stuffle-Beam. Model CIPP ini adalah salah satu jenis evaluasi yang tidak terlalu menekankan pada tujuan program. Prinsip model CIPP ini menekankan pada definisi evaluasi program pendidikan dan model ini disusun dengan tujuan untuk melengkapi dasar pembuatan keputusan dalam evaluasi sistem dengan analisis

yang berorientasi pada perubahan yang terencana (Sukardi, 2011:62-63).

Sasaran evaluasi CIPP ini terkandung dalam nama evaluasi itu sendiri. Sasaran evaluasi yang dimaksud adalah *context evaluation* (evaluasi terhadap konteks), *input evaluation* (evaluasi terhadap masukan), *process evaluation* (evaluasi terhadap proses), dan *product evaluation* (evaluasi terhadap hasil) (Suharsimi Arikunto & Cepi Safruddin Abdul Jabar, 2004:29).

Evaluasi konteks yang akan diteliti dalam penelitian ini mencakup tujuan kebijakan JPD dan dukungan orang tua serta guru. Beberapa aspek yang akan diteliti dalam evaluasi input yaitu jumlah penerima kebijakan, tanggapan mengenai kebijakan, dan prestasi siswa yang dikenai kebijakan. Aspek yang diteliti dalam evaluasi proses antara lain proses pelaksanaan kebijakan JPD, kemampuan staff yang diberi tanggung jawab, pemanfaatan sarana prasarana dan upaya mengatasi hambatan yang ditemui selama proses kebijakan JPD. Evaluasi produk yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu keinginan atau motivasi siswa untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan mempunyai makna yang luas dan beragam. Kebijakan pendidikan berasal dari ilmu pendidikan yang bersifat teoritis dan praktis. Tilaar dan Riant Nugroho (2008:140) mendefinisikan kebijakan pendidikan sebagai berikut :

“Kebijakan pendidikan merupakan keseluruhan proses dan hasil perumusan langkah-langkah strategis pendidikan yang dijabarkan dari visi, misi pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam rangka untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan dalam suatu masyarakat untuk suatu kurun waktu tertentu.”

Salah satu jenis kebijakan publik yaitu kebijakan pendidikan. Proses pembuatan kebijakan pendidikan tidaklah jauh berbeda dengan proses pembuatan kebijakan publik. William N. Dunn (2003:25) memaparkan tahapan dalam proses pembuatan kebijakan meliputi : 1) penyusunan agenda, 2) formulasi kebijakan, 3) adopsi kebijakan, 4) implementasi kebijakan, dan 5) penilaian kebijakan.

Jaminan Pendidikan Daerah

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah dalam pasal (1) menjelaskan bahwa jaminan pendidikan daerah adalah bantuan biaya pendidikan bagi keluarga pemegang KMS (Kartu Menuju Sejahtera) berupa bantuan operasional, bantuan biaya investasi dan bantuan biaya pribadi.

Maksud, tujuan, dan azas sebagaimana yang tercantum dalam Perwal Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah, pada Bab II pasal (2), pasal (3), dan pasal (4) yaitu :

Pasal 2

Maksud diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah untuk peningkatan

kesempatan memperoleh pendidikan bagi penduduk Daerah dan penuntasan Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun.

Pasal 3

Tujuan diberikannya Jaminan Pendidikan Daerah adalah agar tidak ada anak usia sekolah dari keluarga pemegang KMS yang tidak bersekolah karena alasan biaya.

Tabel 2. Jenis dan Besaran Dana JPD bagi Peserta Didik Pemegang KMS

| Jenjang Pendidikan | | Jenis Biaya | | Jmlh |
|--------------------|--------|-------------|-----------|-----------|
| | | Operasional | Personal | |
| TK | Negeri | - | 700.000 | 700.000 |
| | Swasta | 700.000 | 700.000 | 1.400.000 |
| SD | Negeri | - | 700.000 | 700.000 |
| | Swasta | 1.000.000 | 700.000 | 1.700.000 |
| SMP | Negeri | - | 800.000 | 800.000 |
| | Swasta | 1.500.000 | 1.000.000 | 2.500.000 |
| SMA | Negeri | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | Swasta | 1.500.000 | 2.000.000 | 3.500.000 |
| SMK | Negeri | 1.500.000 | 1.500.000 | 3.000.000 |
| | Swasta | 1.500.000 | 3.000.000 | 4.500.000 |

Sumber : UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta

Wajib Belajar 12 (Dua Belas) Tahun Di Kota Yogyakarta

Kota Yogyakarta yang dikenal sebagai kota pelajar telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 khususnya dalam bidang pendidikan. Program wajib belajar 12 (dua belas) tahun merupakan salah satu sasaran pembangunan dalam bidang pendidikan di Kota Yogyakarta. Hal ini terus diupayakan oleh pemerintah agar pendidikan minimal masyarakat Kota Yogyakarta setara dengan pendidikan Sekolah Menengah.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian evaluatif

dengan pendekatan kuantitatif. Sugiyono (2007:8) menjelaskan bahwa metode penelitian kuantitatif diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme. Metode penelitian kuantitatif digunakan untuk meneliti suatu populasi atau sampel tertentu.

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian yang dilakukan pada bulan April – Mei 2016 ini bertempat di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan SMA

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2007:80). Populasi dalam penelitian ini yaitu siswa pemilik KMS di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, siswa pemilik KMS di SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan siswa pemilik KMS di SMA Negeri 11 Yogyakarta.

Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi. Sampel yang diambil dari suatu populasi harus betul-betul representatif (Sugiyono, 2007:81). Penentuan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan Rumus Slovin (Husein Umar, 2004:37) yaitu :

$$n = \frac{N}{N(d)^2 + 1}$$

Keterangan :

n = jumlah sample yang dicari

N = jumlah populasi

d = nilai presisi (90% atau 0,1)

Tabel 3. Daftar Populasi dan Sampel Siswa Pemilik KMS di 3 Sekolah

| No | Sekolah | Populasi | Sampel |
|----|--------------------|----------|--------|
| 1 | SD N Lempuyangan 1 | 219 | 69 |
| 2 | SMP N 15 | 342 | 78 |
| 3 | SMA N 11 | 45 | 32 |

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu angket studi dokumentasi.

Uji Validitas dan Reliabilitas

Validitas instrumen yaitu jika korelasi butir dengan total seluruh butir (Part Whole) minimal 0,3 maka butir tersebut valid. Jika korelasi kurang dari 0,3 butir gugur. Hasil ujicoba dirangkum sebagai berikut :

Tabel 4. Uji Validitas Instrumen

| Responden | Butir Valid | Butir Gugur | Keterangan |
|-----------|---|-------------|-----------------|
| Siswa | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28, 29, 30 | 25 dan 27 | Valid (r > 0,3) |
| Guru | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | - | Valid (r > 0,3) |

(Sumber : Hasil analisis ujicoba)

Tabel 5. Uji Analisis Reliabilitas Cronbach's Alpha

| Cronbach's Alpha (angket siswa) | N of Items | Cronbach's Alpha (angket guru) | N of Items |
|---------------------------------|------------|--------------------------------|------------|
| ,834 | 30 | ,918 | 10 |

Teknik Analisis Data

Dari hasil penelitian dapat diketahui persentase dari keefektifan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun di Kota Yogyakarta.

Persentase dapat dihitung dengan rumus yang dikemukakan oleh Tulus Winarsunu (2010:20), yaitu :

$$P = \frac{f}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Persentase yang akan dicari

F = jumlah skor jawaban responden

N = skor maksimal

Berdasarkan rumus di atas, menurut Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin (2009:35) presentase diinterpretasikan dalam lima tingkatan, oleh karena itu evaluasi kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah dalam penuntasan wajib belajar dua belas tahun di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta dan SMA Negeri 11 Yogyakarta di konversikan menjadi :

81% - 100% = Sangat Tinggi

61% - 80% = Tinggi

41% - 60% = Cukup

21% - 40% = Rendah

0% - 20% = Sangat Rendah

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disebutkan, secara umum dapat diketahui bahwa :

1. Evaluasi Konteks

Aspek yang diteliti dalam evaluasi konteks adalah tujuan, pemenuhan kebutuhan oleh kebijakan, dan dukungan orang tua serta guru. Hasil penelitian pada aspek yang pertama yaitu tujuan menunjukkan bahwa tujuan kebijakan Jaminan Pendidikan Daerah (JPD) ditemukan dalam kategori tinggi, karena tujuan kebijakan JPD sudah tercapai, yaitu tidak ada lagi siswa yang putus sekolah karena alasan biaya. Hasil ini ditunjukkan dari wawancara dengan Kepala UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta dan berdasarkan data jumlah anak putus sekolah yang jumlahnya mengalami penurunan.

Aspek ketiga dalam evaluasi konteks adalah dukungan orang tua dan guru. Hasil penelitian mengenai dukungan orang tua dan guru dalam proses belajar mengajar ditemukan dalam kategori yang sangat tinggi karena menurut siswa, orang tua dan guru sangat mendukung proses belajar mengajar. Hasil ini ditunjukkan dari pengisian angket yang diisi oleh siswa. Dukungan orang tua ditunjukkan dengan menemani ketika belajar dirumah, membantu jika siswa mengalami kesulitan belajar, memantau hasil belajar siswa, dan memperhatikan kebutuhan sekolah siswa. Dukungan guru ditunjukkan dengan mendukung untuk lulus dalam UN, memberi semangat untuk melanjutkan sekolah ke

jenjang berikutnya, mengarahkan untuk terus bersekolah, dan mengajarkan materi pelajaran yang mudah dipahami.

2. Evaluasi Input

Aspek yang diteliti dalam evaluasi input adalah aturan pelaksanaan, tanggapan, dan prestasi yang telah diraih siswa. Hasil penelitian pada aspek yang pertama yaitu aturan pelaksanaan kebijakan JPD ditemukan baik, karena Walikota Yogyakarta mengatur kebijakan tersebut dalam Perwal Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah. Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menanggapi peraturan tersebut dengan membuat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/222 Tentang Petunjuk Teknis Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah.

Aspek kedua dalam evaluasi input yaitu tanggapan siswa mengenai kebijakan JPD. Menurut Jalaludin Rakhmat (2007:51) tanggapan adalah pengalaman tentang obyek, atau peristiwa yang didapatkan dari penyimpulan informasi dan penafsiran pesan. Pengalaman mendapatkan bantuan JPD inilah yang digali menggunakan instrumen angket pada siswa. Hasil penelitian tanggapan siswa mengenai kebijakan JPD terdapat pada kriteria yang sangat tinggi. Dari hasil penelitian sebanyak 179 siswa atau 29,4 % mengakui bahwa mereka setuju kebijakan JPD sangat bermanfaat dan mereka juga merasa terbantu untuk memenuhi kebutuhan sekolah dengan kebijakan JPD.

Aspek ketiga yaitu prestasi siswa penerima bantuan JPD. Pengertian prestasi menurut Kamus Lengkap Bahasa Indonesia (Budiono, 2005:216) yaitu hasil yang telah dicapai, dilakukukan maupun dikerjakan. Hasil penelitian mengenai prestasi siswa penerima bantuan JPD terdapat pada kriteria yang rendah. Berdasarkan hasil wawancara dengan guru pengelola JPD di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta dan SMA Negeri 11 Yogyakarta menyebutkan bahwa prestasi siswa penerima bantuan JPD sudah cukup.

3. Evaluasi Proses

Aspek yang diteliti dalam evaluasi proses yaitu kesesuaian rencana kebijakan JPD dengan penyelenggaraan kebijakan JPD, staff yang terlibat dalam kebijakan JPD, sarana prasarana yang digunakan dalam kebijakan JPD, dan hambatan yang dijumpai dalam penyelenggaraan kebijakan JPD. Tahapan penyelenggaraan kebijakan JPD antara lain pengajuan permohonan, pencairan dana (verifikasi), pengelolaan dan pelaporan dana. Tahapan pertama yaitu pengumpulan berkas pengajuan permohonan calon peserta didik penerima bantuan JPD. Hasil penelitian mengenai kelengkapan berkas yang dikumpulkan sudah tinggi, orang tua sudah dapat memahami berkas-berkas yang harus dikumpulkan untuk kelengkapan administrasi penerimaan bantuan JPD. Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/222 Tentang Petunjuk

Teknis Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah, peserta didik menyerahkan fotokopi KMS dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh kelurahan setempat serta mengumpulkan fotokopi akte kelahiran.

Tahapan kedua dalam penyelenggaraan kebijakan JPD yaitu verifikasi sekaligus pencairan dana. Hasil penelitian mengenai pencairan dana bantuan JPD ditemukan sudah tinggi, karena sudah memanfaatkan sarana prasarana yang ada yaitu melalui rekening (transfer). Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/222 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah, penyerahan dana bantuan JPD dilakukan dari UPT JPD Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta kepada kepala satuan pendidikan (kepala sekolah). Penyerahan dana bantuan ini dilakukan melalui rekening sekolah yang dikelola guru pengelola JPD di sekolah.

Tahapan ketiga dalam penyelenggaraan kebijakan JPD yaitu pengelolaan dana JPD. Hasil penelitian mengenai pengelolaan dana bantuan JPD ditemukan sudah tinggi, karena prosedur pengelolaan sudah sesuai dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/222 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Dan Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah. Petunjuk teknis tersebut menyebutkan bahwa dana JPD digunakan untuk biaya pendidikan

satu tahun pelajaran yang sedang berlangsung, sekolah tidak diperbolehkan memungut biaya operasional dan personal siswa penerima bantuan JPD, dana JPD harus dikelola sekolah, penggunaan dana JPD harus sesuai dengan perencanaan yang telah diajukan, kepala sekolah menunjuk guru yang bertugas mengelola dana JPD, sekolah wajib mencatat dan membukukan penggunaan dana JPD. Petunjuk teknis pengelolaan dana JPD yang tertuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta Nomor 188/222 sudah dilaksanakan oleh sekolah.

Tahapan keempat dalam penyelenggaraan kebijakan JPD yaitu pelaporan dana JPD. Hasil penelitian mengenai pelaporan dana bantuan JPD ditemukan cukup. Pihak guru disekolah sudah berusaha untuk mengumpulkan laporan tersebut tepat pada waktunya.

Staff yang terlibat dalam penyelenggaraan kebijakan JPD yang diteliti menunjukkan kriteria yang cukup. Guru-guru disekolah sudah sangat maksimal dalam pemanfaatan sarana prasarana dalam pelaksanaan kebijakan JPD. Guru-guru disekolah dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dijumpai pada pelaksanaan kebijakan JPD.

4. Evaluasi Produk

Evaluasi produk penelitian ini yaitu keinginan atau motivasi siswa untuk melanjutkan sekolah. Hasil penelitian motivasi siswa melanjutkan sekolah terdapat pada

kriteria yang sangat tinggi. Motivasi ini diukur dengan motivasi eksternal target siswa, kesadaran, prestasi siswa, dan niat siswa. Dari hasil penelitian sebanyak 179 siswa atau 29,4 % mengakui bahwa mereka setuju untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Peserta didik di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan SMA Negeri 11 Yogyakarta berharap dapat mencapai lulus ujian nasional tepat waktunya, yakin dapat melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi, sadar dengan pentingnya belajar, termotivasi untuk memiliki prestasi yang lebih tinggi dan memiliki niat yang tinggi untuk melanjutkan sekolah. Hal ini sesuai dengan teori. Motivasi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi dapat dipengaruhi oleh faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor ekstrinsik yang dapat mempengaruhi faktor intrinsik peserta didik yaitu peran pendidik (guru dan orang tua) memotivasi peserta didik dan peran sekolah menimbulkan suasana kondusif yang memotivasi peserta didik, sehingga peserta didik di SD Negeri Lempuyangan 1 Yogyakarta, SMP Negeri 15 Yogyakarta, dan SMA Negeri 11 Yogyakarta memiliki motivasi yang tinggi untuk melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Evaluasi konteks penyelenggaraan kebijakan JPD sudah dalam kategori sangat tinggi, evaluasi input penyelenggaraan kebijakan JPD dalam kategori sangat tinggi, evaluasi proses penyelenggaraan kebijakan JPD dalam kategori sangat tinggi, dan evaluasi produk penyelenggaraan kebijakan JPD sudah dalam kategori sangat tinggi.

Saran

Hubungan kerjasama antara orang tua dan pihak sekolah senantiasa lebih dipererat dan sifatnya saling membantu, penambahan guru pengelola JPD, agar hasil yang dicapai dapat lebih baik, dan pemberian jadwal pengumpulan berkas-berkas ataupun pengumpulan laporan penggunaan dana JPD yang lebih maju daripada tanggal yang telah ditetapkan, sehingga pada saat tanggal yang telah ditentukan sekolah sudah mengumpulkan semua dokumen dengan lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Budiono. (2005). *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Surabaya : Karya Agung
- Data dari Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Provinsi DIY tentang Angka Partisipasi Kasar, Angka Partisipasi Murni, dan Angka Putus Sekolah di Kota Yogyakarta Tahun 2012-2014
- Dunn, William. (2003). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press
- Husein Umar. (2004). *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*. Jakarta : Raja Grafindo Persada

- Jalaludin Rakhmat. (2007). *Persepsi Dalam Proses Belajar Mengajar*. Jakarta : Rajawali Press
- Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 188/222 Tentang Juknis Pelaksanaan Pemberian & Pengelolaan Jaminan Pendidikan Daerah
- Musaheri. (2007). *Pengantar Pendidikan*. Yogyakarta : IRCiSoD
- Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2005-2025
- Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pemberian Jaminan Pendidikan Daerah
- Sugiyono, Prof. Dr. (2007). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Abdul Jabar. (2009). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa Dan Praktisi Pendidikan Edisi Kedua*. Jakarta : Bumi Aksara
- Suharsimi Arikunto dan Cepi Safruddin Abdul Jabar. (2004). *Evaluasi Program Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Praktisi Pendidikan*. Jakarta : Bumi Aksara
- Sukardi, Prof. H.M. (2011). *Evaluasi Pendidikan Prinsip dan Operasionalnya*. Jakarta : Bumi Aksara
- Tilaar, H.A.R & Riant Nugroho. (2008). *Kebijakan Pendidikan*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Tulus Winarsunu. (2010). *Statistik Dalam Penelitian Psikologi dan Pendidikan*. Malang : UMM Press